



Konflik perbatasan Pemerintah Daerah/Wilayah Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Paniai dan Puncak Jaya di Provinsi Papua

MANIK, Arles, Dr. Pratikno, M.Soc.Sci

Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Dahrendorf, Ralf, *Konflik-konflik dalam Masyarakat Industri*, sebuah analisa kritik, terjemahan Alimandan, (CV. Rajawali, Jakarta, 1986).

Dwiyanto, Agus dkk, 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hardjana, Agus M, 1994, *Konflik di Tempat Kerja*, Kanisius, Yogyakarta.

Imawan, Riswandha, 2003, *Berita Perbatasan, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Depdagri*, Jakarta.

Islamy, Irfan M. 1991, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Margaret M. Poloma, 2003, *Sosiologi Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Kerjasama dengan yayasan Solodaritas Gadjah Mada (Yasogama), Yogyakarta.

Miall, Hugh dkk, 1999, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moleong, Lexy J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung.

Nasikun J, 1984, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ngadisah, 2003, *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*, Pustaka Raja, Yogyakarta.

Nugroho D, Riant. 2000, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi. Elex Media Komputindo. Jakarta.*

Pickering, Peg, terjemahan Masri Maris, 2001, *How to Manage Conflict*, Erlangga, Jakarta.

Pramono, Budi R, 2005, *Tesis Inisiasi Kerjasama antar Daerah*, PLOD Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pratikno, 2002, *Manajemen dan Kebijakan Keuangan Daerah*, Pasca Sarjana MAP, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



Ras **Konflik perbatasan Pemerintah Daerah/Wilayah Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Paniai dan Puncak Jaya di Provinsi Papua**

MANIK, Arles, Dr. Pratikno, M.Soc.Sci

Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Riwu Kaho, Josef, 1990, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rondinelli, 1983, *Development Projects As Policy Experiment : An Adaptive Approach to Development Administration*, Mathuen, London.

Singarimbun, Masri, 1997, *Metode Penelitian Survey*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sugiyono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Syaukani, HR, Affan Gaffar dan Ryas Rasyid, 2002, "*Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*", Kerjasama PUSKAP dan Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), Jakarta.

Utomo, Warsito, 2003, *Dinamika Administrasi Publik, Analisis Empiris Seputar isu-isu Kontemporer dalam Administraasi Publik di Indonesia*, Pustaka Pelajar kerjasama dengan MAP Universitas Gadjah Mada.

Wibawa, Samodra, 1994, *Kebijakan Publik : Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2001, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan-Peraturan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.



Unc **Konflik perbatasan Pemerintah Daerah/Wilayah Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Paniai dan Puncak Jaya di Provinsi Papua**
 MIMIKA, PANIAI, PUNCAK JAYA.

Universitas Gadjah Mada, 2006 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996, tentang Pembentukan Kabupaten Administratif Kabupaten Paniai dan Puncak Jaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996, tentang Pembentukan Kabupaten Administratif Kabupaten Mimika.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan suatu daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai daerah otonom.

Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah, Surat Mendagri Nomor 126/2742/SJ, tanggal 27 Nopember 2003.